

KONSTRUKSI WACANA DAN PENCITRAAN DALAM DEBAT PERDANA CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DKI

*Discourse Construction and Imaging in the First Debate of Governor
and Vice Governor Candidate of DKI*

Yusup Irawan

Balai Bahasa Jawa Barat
Jalan Sumbawa Nomor 11 Bandung
Telepon (022) 4205468, Faksimile (022) 4218743,
No. ponsel 082126835488, pos-el: irawan.firdaus@ymail.com

Abstract

By analyzing a political debate, we can uncover a lot of political things implied. This critical discourse analysis research with the framework of Hamad's (2007) and Fairclough's (1995) theory analyzed the first political debate among the candidate pairs of governor and vice governor of Jakarta 2017. Specifically, the research is aimed at (1) describing discourse construction built by each candidate pair, (2) uncovering self-image of each pair, and (3) uncovering the negatif image created by each candidate to attack the other candidates. This descriptive-qualitative research found that first there are a lot of positive issues raised by incumbents. On the other side, the oppositions tended to raised negative issues which potentially to drop the incumbents' image. The second, the incumbents tended to build his image as a successful leaders to welfare people. Conversely, the oppositions tended to build their images as the prospective leaders which pro to people, contracondemnation, and respect to ethic and morality. Related to the image of political opponents, this research found that the incumbents as well as the oppositions constructed a various of negative imaging to attack their political opponents.

Keywords: discourse construction, political debate, and political image

Abstrak

Dengan menganalisis sebuah debat politik, kita dapat mengungkap banyak hal yang tersirat dalam politik. Penelitian analisis wacana kritis ini menganalisis debat politik perdana antarpasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta tahun 2017 menggunakan kerangka teori Hamad (2007) dan Fairclough (1995). Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan konstruksi wacana yang dibangun oleh masing-masing pasangan calon, (2) menyingkap citra diri masing-masing pasangan, dan (3) mengungkap citra negatif yang dibuat oleh setiap pasangan calon untuk menyerang pasangan calon yang lain. Penelitian deskriptif kualitatif ini menghasilkan: pertama, banyak isu positif yang diangkat oleh petahana. Di sisi lain, pihak oposisi cenderung mengangkat isu-isu negatif yang berpotensi menjatuhkan citra pihak petahana. Kedua, pihak petahana cenderung membangun citra sebagai pemimpin yang sukses menyejahterakan rakyat. Sebaliknya, pihak oposisi cenderung

membangun citra mereka sebagai calon pemimpin yang berpihak kepada masyarakat, menentang pengutukan, serta menghargai etika dan moralitas. Sehubungan dengan citra lawan politik, penelitian ini mengungkapkan bahwa pihak petahana dan juga oposisi membangun berbagai pencitraan negatif untuk menyerang lawan politik mereka.

Kata kunci: konstruksi wacana, debat politik, dan citra politik

1. PENDAHULUAN

Panggung debat para politisi untuk meraih kekuasaan adalah hal yang menarik untuk dikaji. Dari peristiwa debat itu kita dapat mengetahui visi, misi, dan program yang akan mereka lakukan jika terpilih kelak. Kita pun dapat membaca bagaimana karakter para politisi, bagaimana mereka mencitrakan dirinya, dan bahkan bagaimana mereka menjatuhkan citra lawan politiknya. Kita dapat mengatakan bahwa debat para politisi adalah ajang kontestasi dan ajang kompetisi sebagai wahana untuk meraih kemenangan politik.

Salah satu acara debat politisi yang paling banyak merebut perhatian publik di Indonesia adalah debat perdana pasangan calon (paslon) Gubernur dan calon Wakil Gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada 2017. Debat itu diikuti tiga paslon, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni (paslon 1), Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saipul Hidayat (paslon 2), dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno (paslon 3).

Mengapa debat calon kepala daerah DKI itu menyedot perhatian banyak orang? Jawabannya, yaitu karena ada polemik panas sebelumnya. Orang-orang pasti mengaitkan cagub petahana, yaitu Basuki Tjahaja Purnama dengan kasus dugaan penistaan agama yang melilitnya. Seperti yang dikutip oleh Liputan6.com, menurut data yang dipublikasikan oleh *Politica Wave* beberapa saat setelah debat perdana itu, secara keseluruhan pasangan calon nomor 2, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saipul Hidayat (Ahok-Djarot) mendominasi percakapan warganet di media sosial. Persentasi percakapan mengenai keduanya mencapai angka 53 persen (lihat gambar 1).

Wacana dugaan kasus penistaan agama terus menggerogoti elektabilitas paslon 2. Padahal, jauh hari sebelumnya elektabilitas cagub ini tak terkalahkan. Oleh karena kasus itu, elektabilitasnya dapat diimbangi oleh dua paslon oposisi. Walaupun paslon cagub dari paslon 2 mengalami masalah hukum, paslon 2 dapat lolos ke putaran kedua Pilkada DKI 2017.



Gambar 1: Persentasi Percakapan Debat Perdana Cagub dan Cawagub DKI

2. LANDASAN TEORI

Kajian ini tidak akan fokus pada masalah kasus dugaan penistaan itu. Kajian ini memiliki tiga tujuan. *Pertama*, penelitian ini akan mendeskripsikan konstruksi wacana yang dibangun oleh para paslon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dalam ajang debat resmi perdana yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI pada tanggal 13 Januari 2017. *Kedua*, kajian ini bertujuan untuk mengungkap pencitraan diri seperti apa yang ingin dibangun setiap paslon. Terakhir, kajian ini bertujuan untuk mengungkap pencitraan seperti apa yang dilekatkan para paslon kepada lawan-lawan politiknya.

Dari sisi keilmuan, kajian ini adalah kajian analisis wacana kritis (AWK). Kajian-kajian yang bertema politik, debat politik, dan pencitraan politik dengan pendekatan analisis wacana tentu saja pernah dilakukan oleh peneliti lain dengan tujuan, metode, dan teori berbeda. Beberapa di antaranya adalah yang dilakukan oleh Jazeri (2010), Oktaviani (2014), dan Gunawan (2012). Kajian yang dilakukan Jazeri (2010:1) terhadap debat politik menemukan bahwa strategi penalaran dalam debat politik secara garis besar dapat dibedakan menjadi strategi afirmatif (mengiyakan) dan strategi negatif (menolak). Strategi penalaran yang dilakukan peserta debat politik di TV dipengaruhi oleh sikap institusi yang diwakili terhadap masalah yang diperdebatkan. Hal ini menunjukkan bahwa penalaran dalam debat politik bersifat kompleks. Kompleksitas tersebut terjadi karena penalaran dalam debat politik dipengaruhi oleh dua kepentingan, yakni kepentingan rasionalitas agar argumen yang dibangun masuk akal dan kepentingan institusi yang diwakili agar tujuan politiknya tercapai. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penalaran dalam debat politik berada dalam dua kepentingan, yaitu kepentingan mengikuti logika formal agar argumen yang dibangun menjadi rasional dan kepentingan mengikuti tujuan politik agar tujuan-tujuan politik praktis dapat tercapai sehingga kesalahan penalaran sering terjadi bahkan digunakan sebagai strategi untuk memenangkan debat.

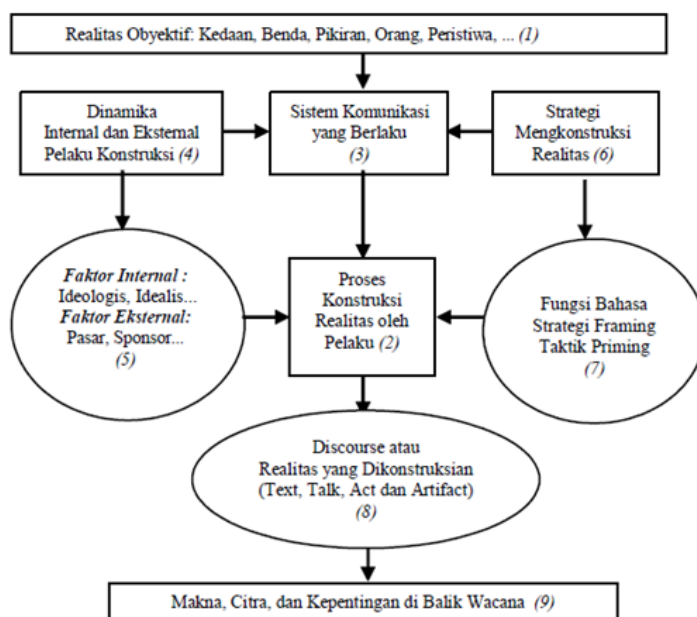
Hasil kajian yang dilakukan oleh Gunawan menyatakan bahwa wacana politik memanfaatkan aspek leksikon dan gramatika. Aspek leksikon meliputi (1) penanaman ideologi dan kekuasaan, (2) perebutan kekuasaan, dan (3) pemertahanan kekuasaan. Aspek gramatika meliputi kalimat (1) aktif, (2) pasif dan (3) nominalisasi. Penggunaan aspek leksikon dan gramatika itu bermakna (1) menyindir, (2) mengakrabkan diri, (3) rendah hati, dan (4) memamerkan diri (Gunawan, 2013:57). Di pihak lain, kajian yang dilakukan oleh Oktaviani (2014) mengimplikasikan bahwa penggunaan debat di televisi sebagai forum komunikasi politik daerah sebenarnya masih belum menjadi sarana utama yang ideal untuk para pemilih lokal melihat kredibilitas dan kapabilitas calon pemimpin daerahnya.

Fairclough (1995:178) dalam hasil analisisnya terhadap sebuah acara debat politik di sebuah stasiun televisi menyatakan bahwa debat politik dalam televisi dikarakterisasi praktik wacana yang kompleks yang melibatkan berbagai genre dan wacana politik, percakapan, dan hiburan. Kompleksitas tersebut direalisasikan ke dalam makna tekstual yang heterogen dan kontradiktif: identitas hubungan, dan pengetahuan.

Menurut Fairclough dan Wodak (1997) seperti yang dikutip oleh Purbani (2009), analisis wacana kritis memiliki karakteristik sebagai berikut. *Pertama*, memberi perhatian pada masalah-masalah sosial. *Kedua*, percaya bahwa relasi kekuasaan bersifat diskursif. *Ketiga*, percaya bahwa wacana berperan dalam pembentukan masyarakat dan budaya. *Keempat*, percaya bahwa wacana berperan dalam membangun ideologi. *Kelima*, percaya bahwa wacana bersifat historis. *Keenam*, AWK memediasi hubungan antara

teks dan masyarakat sosial. *Ketujuh*, bersifat interpretatif dan eksplanatif. Dan *kedelapan*, AWK percaya bahwa wacana merupakan suatu bentuk aksi sosial.

Ruth Wodak (dalam Irawan, 2010:104) menyatakan bahwa tujuan AWK adalah untuk menganalisis hubungan struktural yang tampak ataupun yang tersirat dalam situasi dominasi, diskriminasi, kuasa, dan kontrol yang termanifestasi dalam bahasa. Analisis wacana kritis tidak hanya berfokus pada analisis linguistik. Lebih dari itu, analisis wacana mencoba mendeskripsikan bagaimana, sesuatu, seseorang, atau kelompok sosial menciptakan makna ketika berinteraksi dengan sebuah teks. Oleh sebab itu, AWK selalu melibatkan konsep kuasa, sejarah, dan ideologi.



Gambar 2: Konstruksi Realitas dalam Membentuk Wacana (Hamad, 2007:327)

Secara lebih konkret kajian AWK ini menggunakan teori konstruksi wacana Hamad (2007) yang konsepnya dideskripsikan dalam gambar 2. Menurut Hamad (2007:327) sebuah wacana muncul dari proses konstruksi realitas oleh pelakunya. Ada realitas pertama, yaitu realitas yang sebenarnya (1) dan ada realitas yang dikonstruksi oleh pelaku pembuat wacana (2). Secara umum, sistem komunikasi adalah faktor yang memengaruhi sang pelaku dalam membuat wacana (3). Secara lebih khusus, dinamika internal dan eksternal akan memengaruhi proses konstruksi itu (4). Artinya, wacana bukanlah sebuah ruang yang vakum atau netral. Pengaruh itu bisa datang dari si pelaku dalam bentuk kepentingan, idealis, ideologis, dan sebagainya. Pun pengaruh itu bisa datang dari kepentingan eksternal, dari khalayak sasaran sebagai pasar, sponsor, dan sebagainya (5). Untuk melakukan konstruksi realitas, pelaku konstruksi memakai strategi tertentu (6) yang di antaranya (a) pilihan bahasa, yaitu mulai dari kata hingga paragraf; (b) pilihan fakta, yang akan dimasukkan dan yang dikeluarkan; populer dengan strategi pembingkaihan atau *framing*; dan (c) pilihan teknik menampilkan wacana apakah di depan atau di dalam yang disebut dengan *priming* (7). Hasilnya adalah wacana yang dikonstruksikan oleh pelaku (8) yang dapat berupa wujud tulisan (*text*), ucapan (*talks*), atau peninggalan (*artifact*). Oleh sebab itu, wacana yang dibangun itu dipengaruhi beberapa faktor. Hamad mengatakan bahwa di balik wacana itu terdapat makna dan citra yang diinginkan, sarat kepentingan yang sedang diperjuangkan.

3. BAHAN DAN METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif dengan sumber data video unduhan debat perdana pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Video debat diunduh dari situs berbagi video Youtube dengan alamat <https://www.youtube.com/watch?v=I-P6G9OAHVE>. Analisis penelitian dilakukan dengan teknik simak dan catat. Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu *pertama* peneliti mencari sumber data berupa video debat yang dapat diunduh. Walaupun sebelumnya sudah menonton acara debat itu secara langsung via televisi, peneliti merasa belum yakin dengan hanya menyimak siaran langsung itu. *Kedua*, peneliti mencatat isu-isu yang diangkat atau ditonjolkan oleh setiap paslon. Pencatatan isu tersebut menjadi penting untuk mengungkap konstruksi wacana yang sedang dibangun oleh setiap paslon. Isu yang diangkat dan yang diabaikan oleh para paslon merupakan upaya strategi *framing* untuk menarik perhatian para pemilih. *Ketiga*, lebih spesifik lagi peneliti mencatat kalimat-kalimat penting yang dilontarkan oleh para paslon. Kalimat-kalimat itu diasumsikan tidak hanya memuat isu yang diangkat, tetapi juga memiliki muatan-muatan ideologis dalam upaya mencitrakan dirinya secara positif dan mencitrakan paslon lainnya secara negatif. Upaya pencitraan positif dari setiap paslon dapat kita endus dari kata-kata yang dilontarkan seperti *kami peduli*, *kami akan bertanggung jawab*, dan sebagainya, sedangkan pencitraan negatif lawan politik dapat kita endus dari isu yang diangkat dan kata-kata berkonotasi negatif, misalnya *banjir*, *sampah*, *kemacetan*, *penggusuran*, *tak mengerti peraturan*, dan sebagainya. Langkah keempat penelitian ini adalah merangkum intisari debat di setiap segmen debat sehingga dapat diambil sebuah kesimpulan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Ikhtisar Debat

Debat perdana paslon gubernur dan wakil gubernur yang diselenggarakan oleh KPUD DKI dimoderatori oleh Ira Koesno, mantan presenter televisi. Moderator bertugas menyampaikan pertanyaan yang telah disusun oleh tim perumus yang ditunjuk oleh KPUD DKI. Moderator pun bertugas mengatur jalannya debat agar tetap berada dalam koridor tema. Tema debat perdana tersebut adalah Pembangunan Sosial-Ekonomi untuk Jakarta.

Debat perdana dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2017 di Hotel Bidakara Jakarta disiarkan langsung oleh tiga stasiun TV, yaitu TV One, NET TV, dan Jawa Pos TV. Debat diikuti oleh tiga paslon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni (paslon 1), Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saipul Hidayat (paslon 2), dan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno (paslon 3). Debat dihadiri pula oleh pendukung setiap paslon.

Paslon 1 diusung oleh Partai Demokrat, PPP, PAN, dan PKB. Paslon ini mengusung konsep “Jakarta untuk Rakyat”. Paslon 2 diusung oleh PDIP, Partai Golkar, Partai Hanura, dan Partai Nasdem. Pasangan ini mengusung slogan “Kerja Keras Bernyali Demi Mempertahankan Singgasana di Balai Kota Jakarta”. Paslon 3 diusung oleh Partai Gerindra dan PKS. Pasangan ini mengusung slogan “Maju Kotanya dan Bahagia Warganya”.

Debat pilkada diatur oleh tata tertib di antaranya, yaitu jawaban pasangan calon harus sesuai dengan tema, fokus dan tidak melebar, dan dilarang menyerang persoalan pribadi di luar tema yang ditetapkan. Debat terdiri atas enam sesi dengan tata cara berbeda. Secara keseluruhan debat perdana tersebut berlangsung lancar,

tetapi bisa disebut juga berlangsung panas karena antarpaslon saling sindir, serang-menyerang konsep dan gagasan, maupun kebijakan yang telah dilakukan.

4.2 Wacana Debat Sesi ke-1

Sesi pertama adalah sesi pemaparan visi dan misi, program kerja unggulan, dan integritas. Sesi pertama dibagi atas tiga segmen. Pada segmen ke-1 paslon 1 diberi kesempatan pertama untuk menjelaskan visi dan misinya terkait dengan topik pembangunan sosial ekonomi.

Awal paparan paslon 1 yang diwakili oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membangun wacana ketidakmampuan Pemprov DKI untuk menyelesaikan masalah warga Jakarta. Hal itu dibuktikan dengan pernyataan bahwa kualitas hidup warga Jakarta menurun akibat banjir, sampah, dan kemacetan. Kemudian, AHY membangun wacana secara tersirat bahwa Pemprov DKI adalah ancaman dari warga Jakarta membuat warga Jakarta merasa kehidupannya tak aman. Dalam paparan awal, kita dapat melihat bahwa paslon 1 menciptakan wacana bahwa petahana Pilkada DKI dalam hal ini paslon 2 bukanlah pemimpin yang mampu menyelesaikan masalah, melainkan pemimpin yang justru menimbulkan masalah. Selanjutnya, paslon satu menawarkan sebuah kepemimpinan yang dapat menyejahterakan masyarakat, membawa kemajuan, dan menciptakan rasa aman.

Di segmen ke-1, paslon 2 yang diwakili oleh Basuki Tjahaya Purnama (BTP) membangun wacana kemajuan yang telah dicapai dalam kepemimpinannya, misalnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang hampir menyamai standar dunia dan layanan pemerintah yang lebih baik. Kemudian, BTP mencitrakan bahwa pemerintahnya adalah pemerintah dengan birokrasi yang bersih, transparan, dan profesional. Pada bagian ini pun BTP membangun wacana bahwa kepemimpinannya yang akan datang adalah kepemimpinan dengan karakter yang baru. Ia mengakui bahwa dirinya selama ini bersikap temperamental sehingga memberi kesan negatif. Tampaknya BTP mengisyaratkan sebuah kepemimpinan yang lebih ramah kepada warga Jakarta.

Paslon 3 yang diwakili oleh Anies Baswedan (AB) membangun wacana kepemimpinan yang dapat menyejahterakan dan menciptakan rasa adil bagi warga Jakarta yang mencakup tersediaan lapangan kerja, pendidikan yang berkualitas, dsb. Kemudian, hal lain yang ditekankan adalah kepemimpinannya sangat peduli dengan masalah narkoba. “Kami akan tegas memerangi narkoba hingga tuntas. Tidak sedikit pun ada toleransi.”

Pada segmen ke-2 para paslon diminta untuk menyampaikan program kerja unggulan. Pada bagian ini paslon 2 mendapat giliran pertama yang diwakili oleh Djarot Saeful Hidayat (JSH). Pada segmen ini paslon 2 menekankan program reformasi birokrasi untuk menyejahterakan masyarakat. Paslon 2 menyampaikan pula jargon kesejahteraan masyarakat Jakarta, “Masyarakat Jakarta otaknya harus penuh. Perutnya harus penuh. Dompetnya juga penuh.” Kemudian, di akhir bagian paslon 2 mencitrakan bahwa kepemimpinannya telah berhasil menyejahterakan masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan, “Tidak pernah terdengar ketika tahun ajaran baru, ibu-ibu datang ke Pegadaian. Juga tak ada keluhan biaya rumah sakit kalau mereka tak mampu karena biaya rumah sakit ditanggung pemerintah.”

Di pihak lain, paslon 3 yang diwakili oleh Sandiaga Uno (SU) menciptakan wacana bahwa ada tiga masalah sosial utama dalam masyarakat: (1) lapangan kerja yang sulit (2) pendidikan, (3) biaya hidup yang mahal. Paslon 3 mencitrakan kepemimpinannya akan dapat menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian,

ditawarkanlah berbagai program, misalnya program pendampingan usaha OK OCE (*One Kecamatan, One center for entrepreneurship*), KJP Plus, dan harga yang terjangkau.

Paslon 1 mewacanakan bantuan tunai untuk masyarakat Jakarta berupa sepuluh program unggulan dalam upaya menyelesaikan berbagai masalah sosial dan ekonomi warga. Kesepuluh program tersebut mengisyaratkan bahwa paslon 1 adalah alternatif kepemimpinan yang memberikan solusi konkret terhadap berbagai masalah yang dihadapi warga. Kesepuluh program yang ditawarkan oleh paslon 1 tampaknya program-program yang menggiurkan warga Jakarta khususnya warga Jakarta yang dari golongan ekonomi lemah, misalnya, bantuan langsung untuk keluarga miskin dan kurang mampu Rp5 juta per tahun dan program bantuan usaha 50 juta per unit usaha. Bagian yang menarik dari kesepuluh program unggulan itu adalah pernyataan, “Kita ingin membangun tanpa mengurus.” Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa kepemimpinan petahana membangun dengan cara mengurus. Selain itu ada pula pernyataan AHY yang menarik untuk dicermati, yaitu “Meningkatkan rasa aman (dan) kerukunan antarwarga.” “Menegakkan hukum dan keadilan bagi semua. *Justice for all*. Jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah. “Jika pernyataan tersebut kita kaitkan dengan fakta bahwa BTP sekarang ini sedang mengalami masalah hukum, tampaknya AHY ingin mengingatkan bahwa ada persoalan hukum yang melilit paslon petahana. Selain itu, AHY membangun wacana bahwa kepemimpinan petahana tidak memberi rasa aman pada masyarakat dan kepemimpinannya itu telah mengancam kerukunan antarwarga.

Pada bagian ke-3 moderator meminta para paslon menjelaskan seberapa jauh visi dan misi para paslon dapat dilaksanakan dengan baik jika para pelaksana tidak dibekali dengan integritas, kejujuran, serta kemampuan yang bertanggung jawab. Paslon diminta untuk menjelaskan bagaimana untuk mengatasi masalah tersebut khususnya jika berhadapan dengan kepentingan pribadi, partai, dan tim sukses melawan kepentingan rakyat Jakarta secara keseluruhan.

Pada bagian ini paslon 3 mendapat giliran pertama. Paslon 3 diwakili oleh AB mencoba mencitrakan bahwa kepemimpinannya tidak sekadar bersikap jujur, tetapi berpihak kepada kepentingan publik. Paslon 3 pun memberi isyarat bahwa ada tata kelola pemerintahan yang tidak diikuti dengan baik. Pada segmen ini paslon 3 melakukan serangan verbal, yaitu, “Kita menyaksikan ketimpangan yang sedang dibuat, yaitu reklamasi.” Pernyataan ini mewacanakan bahwa kepemimpinan petahana telah menciptakan ketimpangan dengan kebijakan reklamasinya. Paslon 3 mencitrakan bahwa kepemimpinannya berpihak pada rakyat, yaitu menolak reklamasi. Terakhir, sekali lagi paslon 3 ingin menunjukkan kepeduliannya pada masalah narkoba.

Pada bagian ini paslon 1 masih diwakili oleh AHY. Paslon 1 mencoba membangun kepercayaan warga Jakarta bahwa kepemimpinannya akan menjaga integritas dengan cara memaparkan jejak rekamnya yang positif di militer dan birokrasi. Selain itu, paslon mewacanakan bahwa kepemimpinan yang baik harus memberi contoh bagi yang lainnya. Hal ini dapat kita tafsirkan bahwa kepemimpinan petahana belum menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dan birokrasi.

Pada bagian ini paslon 2 diwakili oleh BTP. Paslon 2 mencoba mencitrakan bahwa integritas kepemimpinannya sudah teruji melalui pengalamannya di pemerintahan. Paslon 2 menceritakan pengalaman-pengalamannya sebagai pejabat publik. Selain itu, paslon 2 mencoba mengonstruksi wacana bahwa akan ada perubahan karakteristik kepemimpinannya pada masa mendatang jika terpilih lagi. Kepemimpinannya akan lebih santun sesuai dengan harapan publik.

4.3 Wacana Debat Sesi ke-2

Pada sesi kedua para paslon diperkenalkan untuk saling menanggapi dan saling mengkritik. Sesi ini mengangkat topik ketimpangan sosial. Para paslon diminta memaparkan program yang akan dilakukan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.

Pada segmen pertama sesi ini, paslon 1 tetap diwakili oleh AHY. Paslon ini membuka wacana bahwa angka kemiskinan di Jakarta cukup besar. Selanjutnya, AHY menawarkan berbagai program bantuan uang untuk mengurangi rasio ketimpangan dan angka kemiskinan. Program yang disampaikan itu sebenarnya sama saja dengan program-program yang disampaikan pada sesi pertama. Paslon ini masih menciptakan citra bahwa kepemimpinannya kelak dapat menyelesaikan masalah. Paslon ini ingin pula menunjukkan kepeduliannya yang sangat pada rakyat miskin dengan cara bercerita bahwa mereka berkeliling dan bergerilya menemui masyarakat yang untuk makan sehari-hari saja masih sulit.

Paslon 2 mendapat giliran kedua. Pada bagian ini paslon 2 diwakili oleh BTP. Pola wacana yang dikonstruksi mirip dengan pola wacana di sesi pertama, yaitu lebih menonjolkan pencapaian-pencapaian kepemimpinannya dalam mengurangi rasio kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Selain itu, paslon ini memaparkan pula enam program terkait dengan pemberantasan kemiskinan yang mencakup berbagai jaminan sosial di berbagai sektor, yaitu jaminan pendidikan, jaminan kesehatan, jaminan transportasi, jaminan perumahan, harga sembako yang murah, dan modal usaha. Paparan tersebut mengisyaratkan bahwa paslon 2 sudah berhasil menyelesaikan masalah-masalah ketimpangan sosial di Jakarta. Di bagian penutup paslon ini menyampaikan sikap kontra dengan paslon lainnya, yaitu tidak setuju dengan program-program bantuan-bantuan tunai dengan alasan tidak mendidik.

Paslon 3 diwakili oleh AB. Paslon ini berusaha untuk membuat citra bahwa mereka tidak memusuhi kemiskinan dan kebodohan melainkan akan membantu orang miskin. Itu adalah isyarat paslon 3 ingin menunjukkan kepeduliannya terhadap orang miskin dan tidak memandang orang miskin harus diperangi. Paslon ini pun ingin menunjukkan bahwa mereka dapat menyelesaikan masalah kemiskinan, yaitu dengan membangun 44 pusat pertumbuhan ekonomi.

Pada segmen selanjutnya, para paslon dipersilakan untuk saling menanggapi. Paslon 2 mendapat giliran pertama yang diwakili oleh JSH. Paslon 2 bertanya kepada paslon 3 bagaimana pertanggungjawaban bantuan 1 miliar per RW agar para penerima bantuan tidak masuk penjara. Kepada paslon 3, paslon 2 mewacanakan bahwa mereka pun telah membina UMKM dengan tingkat persentase yang berbeda. Paslon 2 mempertanyakan bagaimana menciptakan wirausahawan baru dengan jumlah 200 ribu dan dari mana dananya. Di sini tampaknya paslon 2 berusaha menanamkan rasa ragu warga Jakarta terhadap program-program yang akan dijalankan paslon 1 dan 3 sekaligus juga mewacanakan bahwa mereka telah berbuat dalam upaya membuka lapangan kerja baru.

Menjawab pertanyaan paslon 2, paslon 3 yang diwakili oleh SU menyanggah tingkat keberhasilan pembinaan UMKM dengan mengatakan, "Angka 10% itu dari mana?" Paslon 3 tampaknya ingin menyampaikan bahwa pernyataan paslon 2 itu salah. Selanjutnya, paslon 3 menyampaikan keberhasilannya membina UMKM selama 15 tahun. Kemudian, paslon 3 melakukan kritik bahwa ada ketidakberpihakan dalam sistem yang sedang berlaku. Paslon 2 dianggap tidak bersikap adil oleh paslon 3 membiarkan yang kaya makin kaya, yang miskin semakin miskin. Di akhir penyampaian paslon 3 melakukan kritik kembali bahwa Pemprov DKI tidak peduli

dengan pelaku UMKM, yaitu dengan memberi contoh seorang pedagang nasi uduk yang omsetnya terus menurun.

Selanjutnya menanggapi pertanyaan paslon 2 dan 3, paslon 1 yang diwakili oleh AHY di awal penyampaian melakukan kritik tidak langsung bahwa paslon lain tidak punya rasa kemanusiaan dan ketidakpedulian jika memandang bantuan tunai pada orang miskin dianggap membodohi. Paslon berusaha meyakinkan bahwa program-programnya sangat masuk akal dengan menunjukkan contoh di negara-negara lain.

4.4 Wacana Debat Sesi ke-3

Pada sesi ketiga ada pertanyaan pemandu acara yang harus dijawab oleh para paslon sekaligus para paslon diminta untuk saling menanggapi. Pada debat sesi tiga topik yang diangkat adalah soal penggusuran.

Paslon 3 diminta untuk menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Paslon 3 diwakili oleh AB sebagai juru bicara. Paslon 3 menyampaikan sebuah fakta bahwa warga Bukit Duri memenangkan kasus di PTUN. Paslon 3 melakukan serangan verbal bahwa ada prosedur yang dilanggar oleh Pemprov DKI. Pemprov DKI dianggap tidak bersikap adil dan memusuhi orang miskin. Selanjutnya, paslon 3 menawarkan program perumahan kota untuk mengambil simpati warga Jakarta. Paslon 3 secara tegas menolak penggusuran dan akan mengambil langkah-langkah musyawarah. Di sini paslon 3 tampaknya menawarkan kepemimpinan yang simpatik dan mencitrakan kepemimpinan paslon 2 sebagai kepemimpinan yang tak manusiawi dan sombong.

Paslon 1 mendapat giliran kedua. Paslon 1 masih diwakili oleh AHY. AHY dengan tegas menyampaikan bahwa mereka tidak akan melakukan penggusuran. AHY menjelaskan dampak negatif penggusuran pada warga. Penjelasan AHY ini tampaknya dapat menyentuh perasaan para pemilih dan memperoleh simpati warga. Selanjutnya, AHY menawarkan konsep penataan kota, yaitu tanpa melukai hati warganya dan dengan hati nurani. Paslon 1 berusaha mencitrakan kepemimpinannya adalah kepemimpinan yang manusiawi dan kepemimpinan paslon 2 sebagai kepemimpinan yang tak manusiawi.

Selanjutnya paslon 2 mendapat giliran menanggapi. Paslon 2 berusaha memulihkan citra kepemimpinannya yang dianggap kurang manusiawi dan tak simpatik pada warga. Pada bagian ini paslon 2 diwakili oleh SJH. Ia berusaha meluruskan pandangan bahwa pemahaman terhadap kebijakannya keliru. Katanya, "Sungguh tak manusiawi sebagai ibu kota negara kita membiarkan saudara-saudara kita berpuluh-puluh tahun tinggal di bantaran-bantaran sungai seperti itu, di kolong-kolong jembatan." Selanjutnya SJH menjelaskan berbagai program penanganannya, yaitu menyediakan rusun yang layak huni, subsidi kehidupan, pendidikan, transportasi, dan kesehatannya. Selanjutnya SJH memaparkan keberhasilan program-program itu bahwa IPM kota Jakarta paling tinggi di Indonesia. Tingkat kemiskinan di Jakarta paling rendah. Banjir yang terus bekurang dan memberi legalitas tempat tinggal, dsb.

Selanjutnya giliran paslon 1 untuk memberi tanggapan. Kali ini untuk pertama kalinya paslon 2 diwakili oleh cawagubnya, yaitu Sylviana Murni (SM). Seperti halnya paslon 3, SM berusaha untuk mencitrakan bahwa kepemimpinan paslon 2 tidak manusiawi dengan pernyataan bahwa warga terusir dari rusun karena tak bisa membayar setelah terusir dari tempat tinggalnya. Selanjutnya, SM berusaha meraih simpati dengan mengatakan bahwa, "Menata kota Jakarta tanpa menggusur," "Bekerja dengan hati," dsb. Di sini sekali lagi paslon 1 ingin menunjukkan bahwa

kepemimpinan mereka adalah kepemimpinan manusiawi dan simpatik yang memperhatikan nasib warga yang tergusur.

Kini giliran paslon 2 diberi giliran untuk menanggapi. Kali ini BTP menjadi juru bicara. Seperti halnya SJH, BTP berusaha untuk memulihkan citra negatifnya sebagai pemimpin yang suka menggusur. Ia menjelaskan bahwa ia banyak memberi subsidi pada rakyat miskin melalui sistem. Ia juga mengkritik bahwa pemahaman paslon 1 dan 3 salah tentang masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Menurutnya jauh lebih tidak manusiawi mengajari rakyat yang sudah salah demi kemenangan pilkada. Di sini tampak sekali bahwa BTP berusaha untuk merusak citra paslon 1 dan 2 yang mencitrakan diri sebagai calon pemimpin yang simpatik pada warga yang tinggal di bantaran sungai.

Paslon 3 mendapat giliran terakhir memberi tanggapan. Paslon 3 diwakili oleh AB. Paslon 2 langsung melakukan serangan verbal pada paslon 2. Menurutnya ada kontrak politik paslon 2 lima tahun lalu yang tidak dipenuhi. Jelas sekali paslon 3 berusaha untuk menjatuhkan kembali citra paslon 2. Selanjutnya paslon 3 memberi contoh beberapa penataan tanpa mengusir di beberapa sungai. Pada bagian akhir tanggapannya paslon 3 berusaha menonjolkan kembali karakteristik kepemimpinannya mendatang yang simpatik dengan pernyataan, “Warga diajak berdialog. Warga diajak berdiskusi”, “Lakukan penataan secara bertahap”, dan “Memberikan harga diri, percaya diri.”

4.5 Wacana Debat Sesi ke-4

Sesi ke-4 adalah sesi setiap paslon dapat saling bertanya dan saling berargumentasi dengan catatan tanya jawab itu dalam koridor tema yang diangkat. Tema yang diangkat adalah Pembangunan Sosial Ekonomi Kota Jakarta.

Pada sesi ini paslon 1 diberi kesempatan untuk bertanya duluan dan kesempatan ini digunakan oleh AHY. Sekali lagi AHY mengangkat masalah penggusuran dalam pengantar pertanyaannya dengan menyebut sebuah film dokumenter *Jakarta Unfair*. Sebuah film yang menggambarkan derita sekelompok masyarakat miskin Jakarta yang tergusur. AHY bertanya bagaimana perasaan paslon 2 sebagai pemimpin melihat warga Jakarta yang hidupnya semakin sulit? Pertanyaan lainnya adalah untuk siapa Kota Jakarta ini? Pengantar pertanyaan AHY jelas sekali bermaksud mencitrakan paslon 2 sebagai pemimpin yang tidak punya perikemanusiaan dan pertanyaan AHY jelas sekali ingin mengambil hati para pemilih Jakarta. Pertanyaan itu seolah-olah mewakili perasaan orang-orang yang telah tergusur, sedangkan pertanyaan terakhir dimaksudkan untuk mencitrakan bahwa kepemimpinan paslon 2 adalah kepemimpinan yang tak peduli dengan rakyat miskin.

Untuk menjawab pertanyaan AHY, paslon 2 diwakili oleh BTP. BTP berusaha memulihkan citranya yang baru saja dijatuhkan oleh AHY. Ia mengatakan, “Kami tidak pernah menggusur daerah yang tidak tinggal di aliran sungai.” Selanjutnya paslon 2 menyampaikan keberhasilan kepemimpinannya dengan menyebutkan bahwa mereka telah mengurangi dua pertiga lokasi banjir. Kemudian, ia menyampaikan bahwa ada persepsi yang keliru di masyarakat, “Justru orang-orang banyak bersyukur karena merasa anggota keluarganya aman.” “Seolah-olah kami mengusir orang Jakarta” “Kalau dia ber-KTP DKI pasti dapat rusun.”

Menanggapi jawaban paslon 2, paslon 1 yang diwakili oleh Sylviana Murni (SM) menyatakan bahwa ia jadi bingung. “Bagaimana ya dengan Bukit Duri. Kok, bisa jadi menang?” Pernyataan itu seolah ingin mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh BTP tidak benar. SM pun tampaknya ingin mencitrakan bahwa BTP bukan pemimpin yang taat hukum dan tidak manusiawi. Kata gusur kembali

dilekatkan kepada paslon 2. Selanjutnya, SM berusaha menarik simpati pemilih Jakarta, “Dibutuhkan komitmen seorang pemimpin. Pemimpin yang punya hati. Pemimpin yang memikirkan rakyatnya”.

Merasa mendapat serangan, paslon 2 melakukan upaya serangan balik terhadap paslon 1. Masih diwakili oleh BTP, paslon 2 mengungkap peristiwa lama bahwa SM pernah mengatakan kepada warga Krukut bahwa, “Warga harus cerdas. Kami bukan mengusir. Kami menata.” BTP seolah ingin mengatakan bahwa SM telah menelan ludahnya sendiri. Kemudian, BTP ingin meyakinkan bahwa memindahkan penduduk yang tinggal di sungai adalah hal yang masuk akal dan logika paslon 1 tidak masuk akal. Kemudian, ia menyindir paslon 1 bahwa, “Namanya juga pengen jadi gubernur.” Pada akhir tanggapannya, BTP seolah ingin mengatakan bahwa paslon 1 telah membodohi masyarakat. Ia mengatakan bahwa, “Siapa pun yang jadi gubernur, rakyat itu harus diedukasi. Jangan dibodohi”.

Pada segmen ke-2 sesi debat ke-4, paslon 2 diberi kesempatan menyampaikan pertanyaan kepada paslon 3. Kali ini paslon 2 diwakili oleh JSH. JSH menyampaikan pertanyaan, “Bagaimana logikanya kalau sampai moratorium mobil mewah tidak boleh masuk. Justru kalau seperti ini yang terjadi adalah mobil-mobil murah yang ramah lingkungan masuk ke Jakarta. Apakah solusi ini dapat memecahkan masalah kemacetan di Jakarta? Tampaknya paslon 2 ingin menguji logika berpikir paslon 3 mengenai topik transportasi.

Paslon 3 yang diwakili oleh SU. Ia berusaha meyakinkan bahwa logikanya masuk akal bahwa ada efek kejutan kalau orang kaya, selebritis, dan pejabat naik transportasi umum. Ada sebuah kalimat yang sedikit menyerang paslon 2, yaitu “Bagaimana kalau pejabat-pejabat seperti Pak Basuki dan Pak Djarot juga naik kendaraan umum?” Kalimat ini seolah ingin mengatakan bahwa pejabat sebaiknya memberi contoh kepada masyarakat untuk naik kendaraan umum.

Menanggapi jawaban paslon 3, JSH mencoba menerangkan bahwa logikanya lebih unggul, sedangkan logika berpikir paslon 3 kurang berterima akal. Selain itu ia mencoba meraih simpati para pemilih kelas ekonomi rendah dengan mengatakan ongkos transportasi di DKI sangat murah, Rp 3.500,00 bahkan ada yang digratiskan.

Paslon 3 diberi kesempatan memberi tanggapan yang diwakili oleh AB. AB melakukan kritik terhadap keadaan transportasi di Jakarta bahwa tidak ada perubahan dalam sistem transportasi massal di Jakarta selama beberapa dekade. Paslon 3 akan merancang sistem transportasi yang terintegrasi dan murah. Selebihnya pernyataan paslon 3 berusaha mengambil simpati warga, yaitu dengan mengatakan ongkos untuk anak sekolah Rp0 berangkat dan pulang sekolah.

Pada segmen selanjutnya paslon 3 diberi kesempatan untuk bertanya kepada paslon 1. Paslon 3 yang diwakili oleh AB mengangkat masalah kesempatan kerja yang diprioritaskan untuk warga Jakarta. Di sini AB tampaknya berusaha menarik simpati para penganggur di Jakarta. Pertanyaan paslon 3 kepada paslon 2 adalah bagaimana cara mengoptimalkan Timpora untuk memastikan warga Jakarta tidak kalah bersaing dengan warga di luar Jakarta.

Paslon 1 diwakili oleh SM menjawab pertanyaan paslon 3 dengan memberi contoh di Muara Kamal yang penduduknya tidak punya modal untuk mengolah kerang hijau. Paslon 1 berusaha menarik simpati masyarakat pemilihnya, yaitu dengan menyampaikan janji akan memberikan bantuan dana bergulir dengan bunga 0% dan akan memberikan dana 1 Miliar per-RW.

Paslon 3 menunjukkan ketidakpuasan atas jawaban paslon 1. AB menyatakan bahwa jawaban SM tidak nyambung. Di sini AB ingin menunjukkan bahwa SM tidak memahami persoalan yang ditanyakan. Kemudian ia mengatakan bahwa, “Ibu Sylvi seharusnya mengetahui. Ibu Sylvi adalah bagian dari pemerintahan.” Selanjutnya AB menjelaskan masalah banyaknya pendatang asing tanpa dokumen dan Timpora (Tim Pengawasan Orang Asing). Di sini tampaknya AB ingin menunjukkan dirinya sebagai paslon yang lebih memahami masalah sekaligus juga mengingatkan masyarakat bahwa banyak orang asing yang telah merebut lahan pekerjaan warga Jakarta.

Selanjutnya SM tampaknya ingin mengembalikan citranya bahwa ia memiliki pengalaman yang lebih baik daripada paslon 3, yaitu dengan cara menyatakan bahwa ia adalah mantan Kepala Dinas Kependudukan. Di bagian penutup SM menunjukkan sebuah kartu yang disebut kartu Satu Jakarta. Di sini tampak SM ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka adalah paslon yang inovatif.

4.6 Wacana Debat Sesi ke-5

Pada sesi kelima aturan mainnya sama, yaitu setiap paslon diberi kesempatan untuk bertanya kepada paslon lainnya dan boleh saling menanggapi. Di awal sesi paslon 2 diberi kesempatan untuk bertanya. Paslon 2 yang diwakili BTP mengarahkan pertanyaan kepada paslon 1. Pada pengantar pertanyaan, BTP berusaha untuk menggambarkan kepada para pemilih bahwa program-program yang dibuat oleh paslon 1 bermasalah, melanggar aturan, dan terkesan mencontek. BTP memberi contoh dana bergulir yang macet ratusan miliar ketika SM masih menjabat sebagai walikota. BTP pun ingin menunjukkan bahwa dia lebih memahami masalah dengan mengatakan bahwa kartu terintegrasi harus mendapat persetujuan Bank Indonesia. Di akhir tak lupa paslon 2 menyampaikan pertanyaan bagaimana solusinya.

Menanggapi komentar negatif dan pertanyaan BTP dari paslon 2, paslon 1 yang diwakili oleh SM melakukan serangan balik sekaligus meraih kepercayaan publik, yaitu dengan mengatakan bahwa Kartu Jakarta One belum berjalan dan paslon 1 akan menjalankannya. Paslon 1 akan membuat sebuah aplikasi yang dapat berisi berbagai informasi tentang pendidikan, kesehatan, dll. Di sini tampaknya paslon 1 ingin mencitrakan bahwa mereka adalah paslon yang inovatif. Di bagian akhir SM mencitrakan bahwa paslon 2 telah melakukan pencitraan tanpa hasil nyata, yaitu dengan mengatakan, “Bukan hanya *me-launching*, tetapi realisasinya. Terbukti KJP saja banyak keluhan.”

Paslon 2 yang diwakili oleh BTP kembali mencitrakan bahwa paslon 1 tidak memahami aturan keuangan. BTP menjelaskan bahwa ia sudah bekerja sama dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Kemudian BTP berusaha memulihkan citranya bahwa Kartu Jakarta One sudah jalan; terbukti telah mendapat izin dari Bank Indonesia dan sudah MoU dengan bank-bank di Indonesia. “Itu hanya tinggal cetak saja.” kata BTP. Di akhir tanggapannya BTP kembali lagi menjatuhkan citra paslon 1, “Saya kira kurang mengerti peraturan keuangan.”

Dalam tanggapan selanjutnya kembali paslon 1 melakukan serangan verbal terhadap paslon 2. Kali ini diwakili oleh AHY. Ia mengatakan bahwa, “Inilah masalahnya. Pemimpin yang selalu curiga dengan rakyatnya sendiri.” AHY ingin mencitrakan bahwa paslon 2 adalah pemimpin yang tidak percaya pada rakyatnya. Selanjutnya AHY mencitrakan bahwa dirinya adalah paslon yang peduli terhadap masyarakat, “Tujuannya benar. Kami membantu mengembangkan UMKM. Kami akan berdayakan masyarakat.”

Pada bagian selanjutnya, kesempatan bertanya diberikan paslon 3 kepada paslon 2. Pada bagian ini diwakili oleh AB. AB mengangkat masalah kualitas sumber daya manusia. Paslon 3 ingin menunjukkan kepeduliannya pada pembangunan sumber daya manusia dengan mengatakan, “Konsentrasi pada manusia, pada manusia.” Sebelum bertanya paslon 3 mengkritik paslon 2 bahwa pembangunan yang ada lebih menekankan pada pembangunan fisik, “Jangan berkonsentrasi pada benda-benda yang indah difoto.” Pertanyaan paslon 3 kepada paslon 2 adalah apa strategi untuk meningkatkan pendidikan di Jakarta?

Menanggapi pertanyaan paslon 3, paslon 2 diwakili lagi oleh BTP. Merasa mendapat kritikan, BTP menjelaskan bahwa kebijakannya tidak salah dengan mengatakan bahwa, “Bagaimana mau sekolah dan beribadah kalau tempatnya banjir sampai tiga minggu. Karena itulah kami membangun fisik.” Kemudian BTP berusaha menyerang balik paslon 3 dengan mengatakan bahwa, “Itu namanya teori. Ngajar jadi dosen di kampus. ..., tapi enggak ada *actionnya*.” Kalimat BTP itu mencitrakan bahwa paslon 2 hanya dapat berteori.

Dalam tanggapannya AB kembali melakukan serangan lagi, “Jawabannya enggak nyambung sama sekali. Jangan hanya kerja, kerja, kerja. Harus punya gagasan. Harus punya kata-kata.” Tampaknya AB ingin mencitrakan bahwa BTP adalah pemimpin yang tak punya ide. Selanjutnya AB menyindir bahwa BTP telah memecah belah masyarakat dengan mengatakan, “Hormati kata-kata.” Di akhir tanggapannya AB berusaha mencitrakan bahwa dirinya peduli dengan dunia pendidikan. Ia mengatakan, “Bangun pendidikan itu penting.”

Pada sesi selanjutnya BTP memberi tanggapan. Di awal tanggapan BTP meyakinkan bahwa ia adalah pemimpin dengan logika yang benar, “Tidak mungkin untuk mencapai tujuan tidak membangun infrastrukturnya”. Ia ingin mencitrakan diri sebagai sebagai pemimpin yang berhasil. Ia menyebutkan beberapa indikator keberhasilannya. Misalnya, Pemprov DKI berhasil memperoleh beberapa penghargaan dari Bappenas. Belum pernah di republik ini sebuah provinsi mendapatkan empat piagam sekaligus dalam hal pembangunan manusia dan itu diperoleh oleh DKI.

Pada segmen selanjutnya, paslon 1 diberi kesempatan untuk bertanya kepada paslon 3. Paslon 1 diwakili oleh SM. Ia mengajukan pertanyaan bagaimana pendapat AB tentang keamanan, ketegangan sosial, dan kriminalitas di DKI? SM mengatakan bahwa ketiga hal itu, DKI termasuk yang terburuk dari kota-kota besar di dunia. Dari isi pertanyaan tampaknya SM ingin mencitrakan bahwa kepemimpinan DKI yang sekarang, paslon 2, tidak dapat mengendalikan ketiga hal tersebut.

Menanggapi pertanyaan itu, paslon 3 diwakili oleh AB. Di awal tanggapan tampaknya AB menyindir bahwa kepemimpinan paslon 2 tidak membawa suasana persatuan dan tak bisa berdialog. Ia mengatakan, “Hadirnya pemimpin seharusnya adalah untuk bisa membawa suasana nyaman bagi semua, persatuan. Pemimpin justru harus bisa berdialog dengan semua.” Kemudian, AB ingin mencitrakan sebagai calon pemimpin yang peduli dengan rasa keadilan dengan pernyataan, “Damai ditandai dengan hadirnya rasa keadilan”. Ditambah lagi AB ingin menarik simpati para pemilih penganggur, yaitu dengan pernyataan, “Lapangan pekerjaan bagi semua”. Sekali lagi AB mencitrakan bahwa paslon 2 tidak bersikap adil, “Untuk urusan pengurusan tegas, tapi untuk urusan prostitusi, Alexis lemah.” Di penutup tanggapan, AB mencitrakan dirinya sebagai calon pemimpin yang tegas. Ia mengatakan, “Kita akan tegas menghadapi mereka.” Dalam tanggapan balik paslon 1,

yang diwakili oleh AHY kembali lagi mengulang pertanyaan yang sama yang disampaikan oleh SM.

Pada tanggapan selanjutnya AB mencitrakan bahwa dirinya adalah calon pemimpin yang tak bermasalah. Ia mengatakan, “Saya dan Bang Sandi bukan bagian dari masalah.” Ia pun mencitrakan diri sebagai alternatif kepemimpinan yang baru. “Kebaruan yang kami tawarkan”, begitu katanya. Ia pun mencitrakan diri sebagai calon pemimpin yang tidak kompromi dengan pelanggaran hukum. “Kami nol kompromi dengan pelanggaran hukum,” katanya.

4.7 Wacana Debat Sesi ke-6

Pada segmen keenam atau segmen terakhir, para paslon diminta untuk menjawab pertanyaan terkait dengan pendidikan. Pertanyaannya adalah langkah apa saja yang akan dilakukan oleh para paslon untuk meningkatkan mutu lulusan dan indikator yang ingin dicapai untuk membentuk karakter siswa dan mengejar ketertinggalan mutu lulusan di DKI.

Pada segmen ini paslon 2 diberi kesempatan pertama untuk menjawab pertanyaan. Paslon 2 diwakili oleh BTP. Dalam kesempatan itu, BTP menyampaikan keberhasilannya sebagai pemimpin Jakarta dalam bidang pendidikan. Ia mengatakan bahwa angka partisipasi pendidikan di DKI lebih tinggi daripada di level nasional. Selanjutnya BTP berusaha untuk mencitrakan diri sebagai pemimpin yang terbuka dengan berbagai masukan, “Kami mengharapkan ada masukan-masukan yang baru.” Dalam kesempatan ini pula BTP berusaha mencitrakan paslon lainnya sebagai paslon yang tidak punya ide baru. “Kami sudah menyelesaikan 188 lokasi ruang publik terpadu ramah anak lengkap dengan pusat olah raganya”. Ia juga menyanggah pendapat AB sebelumnya bahwa ia tidak berani menutup Alexis, “Kami sudah menutup Stadium dan Miles”. BTP melakukan serangan verbal lanjutan terhadap paslon 1 dan 3 dengan mengatakan, “Menjadi gubernur itu bukan hapalan, bukan juga retorika.” Pada penutup tanggapannya BTP berusaha memperoleh simpati para pemilihnya, “Perjuangan kami belum selesai. Kami ikut ini untuk apa. Untuk minta izin kepada warga DKI supaya kami menyelesaikan perjuangan kami yang belum selesai ini.”

Menjawab pertanyaan presenter, paslon 3 yang diwakili oleh AB berusaha untuk memulihkan citranya sekaligus juga melakukan kritik balasan kepada paslon 2. Paslon AB mencitrakan bahwa dirinya adalah calon gubernur yang sangat peduli dengan pendidikan moral. Ia mengatakan sebaliknya. Ia mencitrakan paslon 2 sebagai kepemimpinan yang tak menjunjung moral, karakter, dan nilai. Ia mengatakan, “Di sana tak ada moral, di sana tak ada karakter, di sana tak ada nilai. Kepemimpinan tidak hanya fokus pada material, tetapi fokus pada moral.”

Paslon 1 diwakili oleh AHY, mengungkapkan bahwa, “Sebagai pemimpin harus menunjukkan memiliki karakter yang baik. Menjaga harmoni, menjaga persatuan tanpa menjadi homogen.” Dengan pernyataannya itu paslon 1 ingin mencitrakan bahwa paslon 1 adalah calon kepemimpinan yang peduli dengan pembangunan karakter bangsa sekaligus juga menyindir bahwa paslon 2 sebagai pemimpin yang tidak memiliki karakter yang baik. Di akhir tanggapannya AHY menekankan pula bahwa negeri ini panglimanya hukum bukan kekuasaan. Pernyataan tadi seolah ingin mengingatkan masyarakat bahwa paslon 2 memiliki masalah hukum.

Dalam sesi keenam ada pertanyaan terakhir yang harus dijawab oleh setiap paslon gubernur dan calon wakil gubernur apakah mereka tidak akan tergiur atau akan menolak tawaran menjadi calon presiden atau wakil presiden di Pemilu tahun 2019 jika terpilih menjadi Gubernur Jakarta.

Menjawab pertanyaan Ira Koesno sebagai pemandu debat, paslon 3 yang diwakili oleh AB menjawab bahwa mereka akan memimpin Jakarta hingga tuntas. AB mengatakan, "Ini amanat untuk dituntaskan". Di sini tampaknya AB ingin mencitrakan bahwa dirinya adalah calon pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab. Tak hanya itu AB pun menyatakan bahwa dirinya, "Bukan sekadar memimpin barangnya, tetapi juga akhlak, karakternya, dan membuat Jakarta bersatu dalam kebinekaan." Jelas sekali AB ingin mencitrakan bahwa dirinya adalah calon pemimpin yang menjunjung moralitas.

Paslon 1 yang diwakili oleh AHY menjawab pertanyaan dengan terlebih dahulu mencitrakan dirinya sebagai calon pemimpin yang akan memperjuangkan nasib warga Jakarta dengan mengatakan, "... Kesempatan untuk membuktikan bahwa kami bisa memperjuangkan warga Jakarta." Kami akan fokus dengan strategi untuk memenangkan Pilgub DKI ini. Kami ingin didengarkan oleh rakyat." Berdasarkan pernyataannya itu AHY menjawab pertanyaan pemandu acara secara diplomatis tak ada pernyataan yang mengindikasikan bahwa ia akan menolak tawaran menjadi calon presiden atau wakil presiden pada pemilu tahun 2019.

Paslon 2 yang diwakili oleh SJH menanggapi pertanyaan secara diplomatis juga. Ia lebih menekankan pesan bahwa perjuangan paslon 2 belum selesai. Ia berusaha menarik simpati para pemilih bahwa, "Jiwa raga kami dan pikiran kami, kita curahkan untuk warga Jakarta. Kami adalah pelayan warga Jakarta. Dengan tulus kerja kami untuk Jakarta. Perjuangan belum selesai. Kami ingin lima tahun lagi mengabdikan untuk warga Jakarta." Selain itu, tampaknya paslon 2 ingin mencitrakan bahwa dirinya adalah pemimpin yang siap melayani warga Jakarta dan bekerja dengan ikhlas.

Akhir jawaban paslon 2 sekaligus pula mengakhiri acara Debat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2017-2022.

5. PENUTUP

Praktik wacana yang dikonstruksi dalam debat politik pilkada DKI merupakan upaya para paslon gubernur/wakil gubernur untuk memperoleh kekuasaan, kehormatan, dan agar idealisme serta ideologinya terealisasi. Setiap paslon berusaha memenuhi harapan institusi politiknya sebagai sponsor dan harapan pemilihnya, misalnya harapan agar pelayanan birokrasi pemerintah lebih bersih, tak ada pengusuran, dan tak ada masalah sosial di Jakarta. Para paslon berusaha untuk mengakomodasi pengaruh internal dari dirinya yang ingin berkuasa dan mengakomodasi kepentingan pemilihnya agar mereka dipilih oleh rakyat.

Seperti yang diungkapkan oleh Fairclough (1995:178) bahwa wacana dalam debat politik merupakan wacana yang kompleks dan menghibur ternyata benar adanya. Konstruksi wacana yang dibangun oleh para paslon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI adalah wacana yang kompleks dan menghibur. Ada banyak isu yang diangkat oleh para paslon sebagai bagian dari *framing* wacana (Hamad, 2007:327). Isu-isu yang diangkat menjadi bagian upaya pencitraan sekaligus sebagai senjata untuk menyerang lawan politik. Bagi penonton televisi serang-menyerang soal isu sosial oleh para paslon menjadi hiburan langka.

Isu-isu yang diangkat dalam debat politik perdana Pilkada DKI 2017 menjadi komponen wacana yang dikonstruksi oleh para paslon. Hasil pengumpulan dan analisis data menunjukkan bahwa petahana, yaitu paslon 2 berusaha membangun konstruksi wacana bahwa mereka telah berhasil memimpin Jakarta ke arah yang lebih baik dan rakyat lebih sejahtera. Isu-isu positif yang potensial mencitrakan dirinya sebagai pemimpin yang berhasil tercatat berjumlah 17 isu, yaitu (1) layanan birokrasi

yang bersih, transparan, dan profesional, (2) persoalan banjir telah teratasi, (3) indeks pembangunan manusia (IPM) yang meningkat; tertinggi di tingkat nasional, (4) tidak ada keluhan biaya pendidikan, subsidi pendidikan, (5) jaminan kesehatan, biaya rumah sakit gratis, (6) rasio ketimpangan sosial yang berkurang, (7) pengangguran berkurang; terendah nasional, (8) DKI memperoleh empat penghargaan dari Bappenas, (9) jaminan transportasi murah, subsidi transportasi (10) harga beras di Jakarta paling stabil, (11) pemberian modal usaha dengan untung bagi hasil, (12) penyediaan rusun layak huni, (13) subsidi biaya hidup, (14) angka kemiskinan terendah di Indonesia, (15) penutupan tempat hiburan Miles dan Stadium sebagai sarang perdagangan narkoba, (16) menyelesaikan 188 lokasi ruang publik terpadu ramah anak lengkap dengan pusat olah raganya, dan (17) partisipasi pendidikan di DKI lebih tinggi daripada di level nasional.

Selain terdapat isu yang potensial mengangkat citra petahana sebagai pemimpin yang berhasil memimpin Jakarta, ternyata ada dua isu yang diangkat oleh petahana yang justru potensial mengurangi keterpilihannya, yaitu (1) isu warga Jakarta yang tak boleh tinggal di pinggir sungai dan kolong jembatan dan (2) isu pembatasan jumlah kendaraan di Jakarta. Pengangkatan kedua isu itu sedikit banyak membuat para pemilih Pilkada Jakarta yang tinggal di bantaran sungai dan pemilih yang memiliki kendaraan bersikap negatif kepada paslon petahana.

Kemudian, ada pula isu lain yang diangkat oleh petahana dalam upaya menjatuhkan citra positif para paslon oposisi, yaitu paslon 1 dan paslon 3, yaitu (1) soal bagaimana pertanggungjawaban bantuan dana tunai dalam jumlah miliaran. (2) dana bergulir yang macet ratusan miliar ketika SM masih menjabat sebagai walikota, (3) ide rumah terapung yang dianggap tidak realistis, dan (4) Kartu Jakarta Satu yang dianggap menjiplak kartu Jakarta One. Konstruksi wacana yang mengangkat empat isu itu jelas-jelas akan merugikan citra paslon 1. Selain itu, terdapat pula isu bagaimana mencetak UMKM baru dalam jumlah sangat banyak padahal biayanya sangat besar, sedangkan tingkat keberhasilannya hanya 10%. Gagasan itu dianggap tidak realistis. Sedikit banyak, isu ini akan merugikan paslon 3.

Di pihak lain, para paslon oposisi berusaha pula mengonstruksi wacana dengan isu-isu negatif yang sebagian besar potensial menjatuhkan citra paslon petahana. Secara umum isu besar yang diangkat adalah masalah penggusuran, etika/moral, dan hukum. Secara lebih rinci paslon 1 mengangkat isu (1) banjir, macet, dan sampah, (2) rasa aman warga, (3) penggusuran dan dampak penggusuran, penataan kota tanpa menggusur, (4) hukum dan keadilan (5) angka kemiskinan yang tinggi, (5) pertumbuhan ekonomi, (6) pengangguran, (7) transparansi birokrasi, (8) bantuan modal usaha tunai dan bantuan hidup sehari-hari untuk warga miskin, (9) warga Bukit Duri menang di pengadilan atas Pemerintah DKI (10) kartu Jakarta Pintar banyak keluhan, (15) RT/RW tidak diperankan oleh paslon 2 (11) keamanan, ketegangan sosial, dan kriminalitas DKI terburuk dari kota-kota besar di dunia, (12) karakter pemimpin yang baik, (13) menjaga persatuan, (14) penegakan hukum; paslon 2 memiliki masalah hukum.

Adapun paslon 3 mengangkat isu (1) kesejahteraan, keadilan bagi orang miskin, dan ketimpangan sosial, (2) narkoba, (3) keamanan dan kedamaian, (4) kriminalitas, (5) lapangan kerja yang sulit, kesempatan kerja (6) pendidikan mahal, (7) biaya hidup yang mahal, (8) tata kelola pemerintahan yang tidak diikuti dengan baik, (9) reklamasi pantai Jakarta, (10) pusat pertumbuhan ekonomi, (11) Bukit Duri yang menang di PTUN atas Pemprov DKI, (12) pelanggaran prosedur, (13) peremajaan kota, peremajaan rumah kumuh, (14) kesombongan penguasa, (15) hak warga, (16) janji

kampung deret yang tidak terealisasi, (17) pengawasan orang asing, (20) pemberdayaan RT/RW, (21) pembangunan yang berorientasi fisik, (22) persatuan warga, (23) penggusuran, (24) prostitusi, Alexis, (25) pendidikan moral, dan (26) pembangunan karakter.

Terkait dengan tujuan kedua penelitian ini, yaitu mengungkap pencitraan diri seperti apa yang ingin dibangun setiap paslon. Penelitian ini menemukan berbagai upaya pencitraan diri setiap paslon dalam upaya merebut simpati pemilih Pilkada DKI 2017. Secara umum paslon petahana mencitrakan diri sebagai pemimpin yang berhasil, berpengalaman, dan teruji integritasnya. Hal itu dapat kita buktikan dari pernyataan-pernyataannya yang menunjukkan berbagai kemajuan di Jakarta. Secara lebih rinci ada 21 ragam pencitraan diri yang dibangun oleh paslon petahana, yaitu (1) kepemimpinan yang berhasil, (2) kepemimpinan yang baru; lebih ramah kepada warga, dan lebih santun (3) kepemimpinannya telah berhasil menyejahterakan masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan, (4) integritas kepemimpinannya sudah teruji melalui pengalamannya, (6) pemimpin dengan rekam jejak yang baik, (7) pemimpin yang mampu menyelesaikan masalah-masalah ketimpangan sosial di Jakarta, (8) telah berbuat dalam upaya membuka lapangan kerja baru, (9) anggapan kepemimpinannya kurang manusiawi dan tak simpatik adalah keliru, (10) pemimpin yang berhasil meningkatkan IPM DKI, (11) pemimpin yang banyak memberi subsidi pada rakyat miskin melalui sistem, (12) kepemimpinan yang berhasil mengurangi 2/3 lokasi banjir, (13) pemimpin yang manusiawi, (14) pemimpin dengan logika yang benar, (15) pemimpin yang menggratiskan transportasi bagi orang miskin, (16) pemimpin yang lebih memahami masalah, (17) pemimpin dengan kebijakan yang tidak salah, (18) pemimpin yang berhasil dalam bidang pendidikan, (19) pemimpin yang terbuka dengan berbagai masukan, (20) pemimpin yang berani menutup tempat transaksi narkoba, dan (21) pemimpin yang siap melayani warga Jakarta dan bekerja dengan ikhlas.

Di pihak lain paslon 1 dan 2 sebagai paslon oposisi melakukan pula upaya pencitraan diri. Penelitian ini menemukan 12 ragam pencitraan diri yang dilakukan oleh paslon 1, yaitu (1) mampu menyejahterakan masyarakat, membawa kemajuan, dan menciptakan rasa aman, (2) mampu memberikan solusi konkret dalam menangani kemiskinan, (3) tidak akan menggusur, (4) kepemimpinannya akan menjaga integritas, (5) kepemimpinannya kelak dapat menyelesaikan masalah, (6) kepeduliannya yang sangat pada rakyat miskin, (7) program-programnya sangat masuk akal, (8) kepemimpinannya adalah kepemimpinan yang manusiawi, simpatik, dan empatik pada korban penggusuran, pemimpin yang murah hati; memberi modal usaha, (9) memiliki pengalaman yang lebih baik daripada paslon 3, (10) paslon yang inovatif, (11) kepemimpinan yang peduli dengan pembangunan karakter bangsa, (12) Calon pemimpin yang akan memperjuangkan nasib warga DKI.

Dalam praktik wacana paslon 3 ditemukan 20 ragam pencitraan diri, yaitu (1) kepemimpinannya dapat menyejahterakan dan menciptakan rasa adil, (2) kepemimpinannya sangat peduli dengan masalah narkoba, (3) kepemimpinannya akan dapat menyelesaikan masalah, (4) berpihak kepada kepentingan publik, (5) tidak memusuhi kemiskinan dan kebodohan, (6) dapat menyelesaikan masalah kemiskinan, (6) berhasil mencetak pengusaha UMKM baru, (7) kepemimpinan yang simpatik dan manusiawi, (8) gagasannya masuk akal, (9) pemimpin yang akan menggratiskan ongkos transportasi bagi pelajar, (10) pemimpin yang peduli dengan kesempatan kerja warga Jakarta, (11) lebih memahami masalah, (12) peduli pada pembangunan sumber daya manusia/pendidikan, (13) ingin mencitrakan dirinya sebagai calon pemimpin

yang peduli dengan rasa keadilan, (14) Mencitrakan dirinya sebagai calon pemimpin yang akan tegas pada prostitusi, (15) mencitrakan bahwa dirinya adalah calon pemimpin yang tak bermasalah, (16) mencitrakan diri sebagai alternatif kepemimpinan yang baru, (17) mencitrakan diri sebagai calon pemimpin yang tidak kompromi dengan pelanggaran, (18) calon gubernur yang sangat peduli dengan pendidikan moral, (19) calon pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab, (20) calon pemimpin yang menjunjung moralitas.

Terkait dengan tujuan penelitian ketiga, yaitu mengungkap pencitraan diri seperti apa yang ingin dibangun setiap paslon, penelitian ini menemukan 12 ragam pencitraan negatif paslon 2 terhadap paslon-paslon lainnya. Ragam-ragamnya adalah (1) integritas paslon oposisi belum teruji, (2) mencitrakan paslon 2 hanya bagi-bagi uang, (3) program-program paslon lain meragukan, (4) pemahaman paslon 1 dan 3 salah tentang masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, (5) bahwa SM (paslon 2) telah menelan ludahnya sendiri, (6) paslon 1 telah membodohi masyarakat, (7) logika paslon 3 tidak benar, (8) program-program yang dibuat oleh paslon 1 bermasalah, melanggar aturan, dan terkesan mencontek, (9) mencitrakan bahwa paslon 1 tidak memahami aturan keuangan, (10) paslon 2 hanya dapat berteori, (11) mencitrakan paslon lainnya sebagai paslon yang tidak punya ide baru, (12) paslon lain hanya berteori dan mengandalkan hapalan.

Di pihak lain paslon oposisi pun melakukan pencitraan negatif terhadap paslon petahana. Paslon 1 cenderung mencitrakan paslon petahana sebagai paslon yang suka menggusur dan tak peduli dengan penderitaan rakyat kecil, sedangkan paslon 3 cenderung mencitrakan paslon petahan sebagai paslon yang tidak bersikap adil kepada rakyat dan paslon yang telah memecah belah rakyat.

Secara lebih rinci paslon 1 mencitrakan paslon 2 sebagai paslon yang (1) tidak mampu menyelesaikan masalah warga Jakarta. (paslon 2), (2) ancaman bagi warga (Paslon 2), (3) kepemimpinannya suka menggusur rakyat (paslon 2), (4) memiliki masalah hukum (paslon 2), (5) tidak dapat menjadi contoh yang baik (paslon 2), (5) tidak punya rasa kemanusiaan dan kepedulian pada rakyat kecil, (6) pemimpin (BTP) yang taat hukum, (7) paslon yang telah melakukan pencitraan tanpa hasil nyata, (8) pemimpin yang tidak percaya pada rakyatnya sendiri, (9) tidak dapat mengendalikan keamanan, ketegangan, dan kriminalitas, (1) pemimpin yang tidak memiliki karakter yang baik.

Di sisi lainnya pula, ditemukan 14 ragam pencitraan negatif paslon 3 kepada paslon petahana, yaitu paslon 2 digambarkan sebagai pemimpin yang (1) telah menciptakan ketimpangan, (2) keliru menyikapi kemiskinan, (3) salah dalam memahami tentang UMKM, (4) tidak berpihak kepada rakyat miskin, (6) tidak bersikap adil kepada pelaku UMKM, (7) dianggap tidak bersikap adil kepada rakyat, (8) tak manusiawi dan sombong, (9) melanggar prosedur, (10) melanggar kontrak politik, (11) tidak melakukan perubahan sistem transportasi, (12) menekankan pada pembangunan fisik, Bahwa, (13) yang tak punya ide (BTP), (14) memecah belah masyarakat (BTP), (15) tidak membawa suasana persatuan dan tak bisa berdialog. Kemudian ditemukan pula pencitraan paslon 3 terhadap paslon 1, yaitu (1) SM (paslon 1) tidak memahami persoalan yang ditanyakan, (2) SM (paslon 1) tidak memahami masalah., dan (3) SM (paslon 2) bagian dari pemerintahan

6. DAFTAR PUSTAKA

- Blommaert, Jan. 2005. *Discourse: A Critical Introduction*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Fairclough, Norman. 1995. *Critical Discourse Analysis: the Critical Study of Language*. England: Pearson Education Limited.
- Gunawan, Fahmi. 2012. "Wacana Politik Media Luar Ruang Pemilihan Calon Walikota Kendari Periode 2012—2017". *Jurnal Salingka* terakreditasi LIPI Volume 10 Nomor 1 Edisi Juni 2013.
- Hamad, Ibnu. 2007. "Lebih Dekat dengan Analisis Wacana". *Jurnal Mediator* terakreditasi Dirjen Dikti Volume 8 Nomor 2 Desember 2007.
- Irawan, Yusup. 2010. "Proyek Orgasme: Gambaran Kecil Perlawanan Ideologi Feminisme: Analisis Wacana Kritis". *Jurnal Metalingua* Volume 8 Nomor 1 Juni 2010.
- Jazeri, Mohamad, 2010. "Penalaran dalam Debat Politik di TV" (Disertasi). Malang: Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang.
- Oktaviani, Rani Chandra. 2014. "Analisis Wacana Politik Debat Pilkada di Televisi" (tesis). Depok: Universitas Indonesia.
- Purbani, Widyastuti. 2009. "Analisis Wacana Kritis dan Analisis Wacana Feminis". Makalah yang dibentangkan pada Seminar Metode Penelitian Berbasis Gender di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, 30 Mei 2009.
- Ruisah. 2015. "Analisis Percakapan dalam Program Debat Kandidat Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur". *Jurnal Ilmu Komunikasi Avant Garde* Vol 3 No.2 Desember 2015.
- Wodak, Ruth dan Michael Meyer. 2004. "Methods of Critical Discourse Analysis". London: Sage Publication.

SUMBER INTERNET

"Debat Cagub DKI, Ahok-Djarot Dominasi Percakapan Netizen"
<http://tekno.liputan6.com/read/2828350/debat-cagub-dki-ahok-djarot-dominasi-percakapan-netizen>. Diunduh pada tanggal 20 Januari 2017, pukul 09.35 WIB

